



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

7. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan, penambahan sub kegiatan dan perubahan indikator sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2016-2021, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun

2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4;
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 18).
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematikan penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

	Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Memuat tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk 5 tahun ke depan.
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 5 tahun ke depan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Negara, komersial, umum dan khusus;
- 6) Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- 7) Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 8) Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan Pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- 9) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- 10) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- 11) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- 13) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 17) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

- 18) pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 19) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- 20) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- 21) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- 22) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- 23) pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas, Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi produk hukum lainnya;

- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
 - n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - o. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
 - p. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - q. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - r. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - s. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - t. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - v. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
 - aa. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perumahan
- Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perumahan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Perumahan menjalankan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang perumahan;
 - b. perencanaan operasional program bidang Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perumahan ;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana perumahan;

- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
- f. pelaksanaan verifikasi dan persetujuan *site plan* perumahan pengembang;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perumahan ;
- j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perumahan;
- k. pendataan penyediaan dan rehabilitasi serta sosialisasi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
- l. pembangunan, rehabilitasi dan pendistribusian rumah korban bencana atau relokasi program kota;
- m. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- n. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- o. pencegahan perumahan kumuh pada wilayah perkotaan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Kawasan permukiman menjalankan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Kawasan Permukiman ;
- b. perencanaan operasional program bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Permukiman ;
- d. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian kawasan permukiman bangunan pendukung lainnya;
- f. fasilitasi survey dan pemetaan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis kawasan permukiman dan penataan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kawasan Permukiman ;

- k. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kawasan Permukiman ;
- l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman;
- m. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- n. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- o. pencegahan kawasan permukiman kumuh pada wilayah perkotaan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Nopember 2023, jumlah aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 26 orang dengan rincian 25 orang berstatus ASN dan 1 orang PTT. Adapun rincian sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	3	4	7
5.	Penata (III/c)	0	0	0
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	2	1	3
7.	Penata Muda (III/a)	4	2	6
8.	Pengatur Tk I (II/d)	2	1	3
9.	Pengatur (II/c)	1	0	1
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
13.	Juru (I/c)	0	0	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
15.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
JUMLAH		15	10	25
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	1	4
2.	Sarjana (S1)	7	7	14
3.	Diploma	2	1	3
4.	SLTA	2	1	3
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
JUMLAH		15	10	25

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 2023

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dilengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut adalah:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1 unit	Baik
2.	Jaringan listrik	2 unit	Baik
3.	Jaringan telepon	1 unit	Baik
4.	Tempat Parkir	1 unit	Baik
5.	Kendaraan Roda 4	3 unit	Baik
6.	Kendaraan Roda 3	2 unit	Baik
7.	Sepeda Motor	4 unit	Baik
8.	Meja Kerja	32 unit	Baik
9.	Meja Kursi Tamu	3 unit	Baik
10.	Kursi Kerja	32 unit	Baik
11.	Meja rapat	1 set	Baik
12.	Kursi Rapat	10 unit	Baik
13.	Almari	15 unit	Baik
14.	Rak Arsip	4 unit	Baik
15.	Filling Kabinet	5 unit	Baik
16.	Komputer	9 unit	Baik
17.	Laptop	15 unit	Baik
18.	Printer	19 unit	Baik
19.	Faksimile	1 unit	Baik
20.	Televisi / Monitor	3 unit	Baik
21.	Kamera	1 unit	Baik
22.	AC	7 unit	Baik
23.	Soundsystem	2 unit	Baik
24.	Mesin fingerprint	2 unit	Baik
25.	Jaringan Wifi	2 unit	Baik
26.	Genset	4 unit	Baik
27.	CCTV	10 titik	Baik
28.	Handy Talky (HT)	4 unit	Baik
29.	Proyektor	1 Unit	Baik

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar selama 5 tahun kebelakang digambarkan sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a.	Progran Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman - Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	-	-	-	0,8%	15,6 %	30,4 %	45,2 %	0,8%	2,54 %	26,11 %	60,81 %	72,68 %	2,54 %	317,50 %	167,37 %	200,03 %	160,80 %	317,50 %
b.	Program Pengembangan Perumahan - Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	-	-	-	0,8 %	19,08%	38,46 %	66,15 %	100 %	1,33 %	21,16 %	64,00 %	80,17 %	1,33 %	166,25 %	110,90 %	166,41 %	121,19 %	1,33%
	- Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	-	-	-	60 %	65 %	75 %	85 %	90 %	63,5 %	66,67 %	81,25 %	82,61 %	63,5 %	105,83 %	102,57 %	108,33 %	97,19 %	70,56 %
	- Persentase tingkat hunian Rusunawa	-	-	-	85 %	95 %	100 %	100 %	100 %	86 %	98,89 %	100%	100 %	86 %	101,18 %	104,09 %	100,00 %	100,00 %	86,00 %

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar 2021

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar
Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.311.065.850	13.855.206.150	18.918.841.608	12.232.190.400	21.336.430.000	10.031.303.787	13.181.575.687	17.574.729.799	11.427.184.094		0,81	0,95	0,93	0,93		0,22	0,10

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk urusan perumahan dan kawasan permukiman semakin besar. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu:

- tidak seimbangnya jumlah sumber daya alam yang sangat terbatas dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi.
- perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming terutama untuk peningkatan rumah layak huni serta lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, termasuk pelayanan jalan dan drainase lingkungan.
- Perkembangan wilayah yang pesat dan adanya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin padat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lahan perumahan yang memadai.
- kurangnya kemampuan ekonomi telah menimbulkan munculnya kawasan kumuh dengan indikasi kondisi jalan dan drainase lingkungan yang kurang baik.
- bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan perumahan yang layak huni juga semakin bertambah, sedangkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni juga masih belum optimal.

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman :

- Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat besar.
- Masih adanya rumah tidak layak huni yang harus ditingkatkan kualitasnya.
- Kondisi jalan dan drainase lingkungan yang belum memadai menjadi peluang dan target pelayanan infrastruktur di perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Kota Blitar.

Upaya untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan masih terkendala beberapa permasalahan diantaranya belum optimalnya akses rumah layak huni dan masih adanya kawasan permukiman kumuh yang ditandai dengan infrastruktur jalan dan drainase yang kurang baik.

Belum optimalnya akses rumah layak huni disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya belum optimalnya penanganan rumah rusak dan tidak layak huni, belum optimalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni, belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni, rendahnya pembangunan rumah oleh pengembang perumahan, terbatasnya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.

Sedangkan masih adanya kawasan permukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya akses dan kualitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman khususnya jalan dan drainase lingkungan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni masih cukup tinggi	Kurangnya pembinaan dan sosialisasi rumah layak huni
		Tingginya <i>backlog</i> rumah	Fasilitasi dan sosialisasi terkait program bantuan kredit rumah belum optimal
		Belum optimalnya penanganan rumah akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Terbatasnya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
2	Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh	Rendahnya akses Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di kawasan permukiman	Tingginya kepadatan bangunan
			Kondisi jalan lingkungan yang kurang baik
			Keterbatasan penyediaan air minum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kondisi drainase lingkungan yang kurang baik
			Keterbatasan pengelolaan air limbah
			Keterbatasan pengelolaan sampah
			Belum optimalnya proteksi kebakaran
		Banyaknya jumlah rumah yang ada di tanah ilegal (strain sungai, strain kereta api, tanah aset pemerintah)	Keterbatasan lahan permukiman
			Belum optimalnya pengawasan pembangunan rumah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah: Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

Misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- 3) Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
- 4) Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- 5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan penjabaran rumusan visi dan misi diatas yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang akan dihadapi lima tahun kedepan yaitu misi keempat Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan, dengan tujuan Meningkatnya Kelayakhunian dan sasaran Meningkatnya akses rumah layak huni dan meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, arah kebijakan untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living yaitu peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang

partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman
- c. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman

Kebijakan pengembangan infrastruktur permukiman dijabarkan dalam kebijakan peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan

Sedangkan arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - 1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - 2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - 3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
 - 4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - 1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - 2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;

- 3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan
 - 4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan
 - 5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;
 - 6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - 7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - 8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR
 - 9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:
- 1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - 2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - 3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;
 - 4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
 - 5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;
 - 6) Pengembangan klinik perumahan;
 - 7) Dukungan Pengembangan system housing career;
 - 8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Sedangkan arah kebijakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak melalui :

- a. Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan, dilaksanakan dengan kebijakan :
 1. Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
 2. Pembangunan gedung dan rumah Negara
 3. Pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan rumah negara
- b. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman, Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan Jawa Timur, Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan :
 1. Penyelenggaraan kawasan permukiman
 2. Penyelenggaraan rumah khusus dan swadaya
 3. Penyelenggaraan rumah umum dan komersial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi lingkungan hidup Kota Blitar dapat dilihat dari kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kaitannya dengan KLHS, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dari hasil penjarangan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam KLHS RPJMD Kota Blitar, salah satunya adalah belum tertatanya kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota Blitar yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang perumahan-permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026, maka tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah:

1. Meningkatnya akses rumah layak huni
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar Tahun 2022-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
								2022	2022	2023	2023
							2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio Rumah layak huni adalah perbandingan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya terhadap jumlah penduduk	Jumlah rumah layak huni / jumlah penduduk	Rasio	0,250	0,248	0,251	0,250	0,251
2		Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar layak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan / jumlah rumah x 100%	%	98,31	96,37	97,43	96,99	97,44
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang layak merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan kelengkapan dasar dan kelengkapan penunjang fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak / Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	70,74	72,3	74,47	72,3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
							2020	2022	2022	2023	2023
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
4		Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	68,62	76,83	73,94	77,13
5	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.	Hasil Nilai Sakip Dinas Perumahan Rakyat pada tahun bersangkutan	Nilai	A 82.89	A 84.51	A 85,88	A 84.51	A 86,30

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi akhir Renstra
							2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio Rumah layak huni adalah perbandingan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya terhadap jumlah penduduk.	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	Rasio	0,250	0,251	0,253	0,255	0,255
2		Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar kelayak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	%	98,31	97,61	98,23	98,79	98,79
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang layak merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan kelengkapan dasar dan kelengkapan penunjang fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	78,19	81,91	85,64	85,64

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi akhir Renstra
							2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman							
4		Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	79,26	84,57	89,89	89,89
5	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.	Hasil Nilai Sakip Dinas Perumahan Rakyat pada tahun bersangkutan	Nilai	A 82.89	A 84.53	A 84.55	A 84.57	A 84.57

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT			
MISI : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG YANG BERWAWASASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BERKEADILAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
			2. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 5 tahun mendatang, diperlukan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar
Tahun 2022

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	Tujuan 1 : Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,250	0,248		0.251		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	98,31	96,37		97,43		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang ditangani pada tahun n/Jumlah total rencana unit rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang akan ditangani pada tahun n x 100%	100	100	3.306.078.420	100	2.867.990.356,25	Bidang Perumahan	
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	Jumlah hunian Rusunawa yang terisi/jumlah hunian Rusunawa x 100%	100	95		95			
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate	%	Jumlah data perumahan yang tersusun dan terupdate/jumlah data perumahan x 100%	65	70	160.000.000		174.639.400	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang tersusun dan terupdate	Dokumen	Jumlah dokumen pemetaan lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang tersusun dan terupdate Pada tahun bersangkutan	1	1	50.000.000	1	49.978.000	Bidang Perumahan	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah laporan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang tersusun	laporan	Jumlah laporan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang tersusun pada tahun yang bersangkutan	1	1	25.000.000	1	8.779.400	Bidang Perumahan	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rumah korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	laporan	Jumlah laporan rumah korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi pada tahun bersangkutan	4	4	35.000.000	4	67.508.200	Bidang Perumahan	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen updating data rumah	Doku men	Jumlah dokumen updating data rumah pada tahun bersangkutan	2	1	50.000.000	1	48.373.800	Bidang Perumahan	
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	%	Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi : Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota x 100%	100	100	99.433.300	100	93.314.350	Bidang Perumahan	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi standart teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah	Orang	Jumlah peserta sosialisasi standart teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah pada tahun bersangkutan	50	100	20.000.000	100	20.000.000	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan perumahan baru	Orang	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan perumahan baru pada tahun bersangkutan	50	150	25.000.000	150	19.782.750	Bidang Perumahan	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah tim Satgas dan Fasilitator yang terbentuk dan mendapat pelatihan	Orang	Jumlah tim Satgas dan Fasilitator yang terbentuk dan mendapat pelatihan pada tahun n	20	40	42.519.800	40	41.618.100	Bidang Perumahan	
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah laporan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Laporan	Jumlah laporan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan pada tahun n	2	2	11.913.500	2	11913500	Bidang Perumahan	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	%	Jml jenis penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota dibagi Jml jenis penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota sesuai SPM dikali 100%	100	100	164.769.300	100	7.901.500	Bidang Perumahan	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	Jenis	Jumlah jenis layanan penyediaan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	3 jenis	3 jenis	164.769.300	3 jenis	7.901.500	Bidang Perumahan	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	Indeks	Nilai IKM Pengelolaan Rusunawa	B 80,17	B 80,37	2.881.875.820	B 87,90	2.592.135.106,25	Bidang Perumahan	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah PSU Rusunawa yang terbangun/terehab	unit	Jumlah PSU Rusunawa yang terbangun/terehab pada tahun n	1	1	2.060.428.691	1	1.727.562.351,35	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia	jenis	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia pada tahun n	7	7	821.447.129	7	864.572.754,9	UPT Rusunawa	
		Jumlah rekening yang terbayarkan	Rekening	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun n	4	4		4			
		Jumlah sarana dan prasarana Rusunawa yang terpelihara	Jenis	Jumlah sarana dan prasarana Rusunawa yang terpelihara pada tahun n	11	11		11			
		Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan Rusunawa	Orang	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan Rusunawa pada tahun n	475	935		935			
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	19,53	17,20	2.165.755.400	20	5.279.736.600	Bidang Perumahan	
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	Jumlah pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun n / Jumlah MBR yang belum memiliki rumah pada tahun dasar x 100%	0,93	1,03		1,03			
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	Unit	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya sampai dengan tahun n	154 Data sampai dengan tahun n (di luar kawasan kumuh)	110	2.165.755.400	194	5.279.736.600	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah masyarakat/rumah tangga berpenghasilan rendah yang telah difasilitasi pembangunan rumah	Unit	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang telah difasilitasi pembangunan rumah sampai tahun n	8 (data dasar tahun 2020)	4		10			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang diperbaiki	unit	Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang diperbaiki pada tahun n	58	90	2.165.755.400	194	5.279.736.600	Bidang Perumahan	
		Jumlah rumah tidak layak huni yang terfasilitasi jaringan listrik	Unit	Jumlah rumah tidak layak huni yang terfasilitasi jaringan listrik pada tahun n	9	4		20			
		Jumlah rumah swadaya baru bagi MBR yang dibangun	Unit	Jumlah rumah swadaya baru bagi MBR yang dibangun pada tahun n	9	10		10			
	Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	%	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,30	70,74				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/ Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,30	68,62		76,83		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	Panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n / panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman x 100%	62,65	65,90	11.705.181,880	78,01	10.888.931.240	Bidang Kawasan Permukiman	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	Panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n / panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman x 100%	56,88	63,10		75,66		Bidang Kawasan Permukiman	
		Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	9,8	12,22		6,37		Bidang Perumahan	
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	Dokumen	Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun pada tahun n	8	8	405.019.700	8	501.006.800	Bidang Kawasan Permukiman	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang tersusun	Laporan	Jumlah laporan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang tersusun pada tahun n	4	4	40.443.300	4	37.273.100	Bidang Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data base permukiman yang tersusun dan terupdate	Doku men	Jumlah dokumen data base permukiman yang tersusun dan terupdate pada tahun n	4	4	328.831.500	4	412.814.200	Bidang Kawasan Permukiman	
	Pembentukan/Pem binaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbina	Kelom pok	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbina pada tahun n	2	2	10.200.000	2	9.714.000	Bidang Kawasan Permukiman	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah peserta sosialisasi penataan kawasan permukiman	Orang	Jumlah peserta sosialisasi penataan kawasan permukiman pada tahun n	100	370	25.544.900	370	41.205.500	Bidang Kawasan Permukiman	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	113.827	120.663	11.300.162.180	183779	10.387.924.440	Bidang Kawasan Permukiman	
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	54.027	61.664		103547		Bidang Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	unit	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya sampai tahun bersangkutan	258	140		58		Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang dibangun dan diperbaiki	Unit	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang dibangun dan diperbaiki pada tahun bersangkutan	118	140	2.911.287.000	58		Bidang Perumahan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Panjang jalan lingkungan di permukiman berpotensi kumuh yang terbangun dan terpelihara	M	Panjang jalan lingkungan berpotensi kumuh yang terbangun dan terpelihara pada tahun bersangkutan	1769	1790	4.895.065.230	4006.9	6.013.216.565	Bidang Kawasan Permukiman	
		Panjang drainase lingkungan di permukiman berpotensi kumuh yang terbangun dan terpelihara	m	Panjang drainase lingkungan di permukiman berpotensi kumuh yang terbangun dan terpelihara pada tahun bersangkutan	303	3736		4.966.274			
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Panjang jalan lingkungan di permukiman kumuh yang terbangun dan terpelihara	m	Panjang jalan lingkungan di permukiman kumuh yang terbangun dan terpelihara pada tahun bersangkutan	250	2941	3.493.809.950	3952	4.374.707.875	Bidang Kawasan Permukiman	
		Panjang drainase lingkungan di permukiman kumuh yang terbangun dan terpelihara	m	Panjang drainase lingkungan di permukiman kumuh yang terbangun dan terpelihara pada tahun bersangkutan	435	2137		2370.64			
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	Panjang jalan lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n /panjang jalan lingkungan di perumahan x 100%	59	62	1.576.467.980	74,16	1.920.110.586	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	Panjang drainase lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n /panjang drainase lingkungan di perumahan x 100%	59	62		74			
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	19.827,17	20123	1.576.467.980	24071	1.920.110.586	Bidang Perumahan	
		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	13.432,28	13475		13698,90			
	Perencanaan penyediaan PSU	Jumlah dokumen database PSU Perumahan yang tersusun dan terupdate	Dokumen	Jumlah dokumen database PSU Perumahan yang tersusun dan terupdate pada tahun n	1	1	102.000.000	1	174.146.950	Bidang Perumahan	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang jalan lingkungan perumahan yang terbangun dan terpelihara	m	Panjang jalan lingkungan perumahan yang terbangun dan terpelihara pada tahun n	295,8	2000	1.468.166.680	2000	1.738.804.336	Bidang Perumahan	
		Panjang drainase lingkungan perumahan yang terbangun dan terpelihara	m	Panjang drainase lingkungan perumahan yang terbangun dan terpelihara pada tahun n	100	746		879,20			
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Perumahan	laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Perumahan	12	12	6.301.300	12	7.159.300	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	A 82.89	A 84,51				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	A 82.89	A 84,51				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Nilai IKM pada tahun bersangkutan	B 80,17	B 80,37	4,679,147,737	B 87,90	4.162.219.496,9	Sekretariat	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	100	100	61.918.900	100	36.789.900	Sekretariat	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	15	15	15.000.000	15	15.000.000	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Doku men	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	12	12	36.919.900	12	11.919.900	Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Doku men	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	1	1	9.999.000	1	9.870.000	Sekretariat	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	100	100	3.867.858.416	100	3.051.719.526	Sekretariat	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Orang	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan tahun n	30	26	3.861.358.616	25	3.045.219.726	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Doku men	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	7	7	6.499.800	7	6.499.800	Sekretariat	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	100	100	72.593.200	100	90.392.700	Sekretariat	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Publi kasi	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	11	11	72.593.200	11	90.392.700	Sekretariat	
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	2	5		5		Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	100	100	512.954.450	100	703.038.301,90	Sekretariat	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	15	10	9.708.700	10	9.708.700	Sekretariat	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Macam	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	14	8	178.732.800	8	230.833.000	Sekretariat	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Macam	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	9	7		7			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Macam	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	55	35	14.120.200	35	19.119.600	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Macam	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	49	49	76.402.300	49	236.214.507,90	Sekretariat	
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Dos	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	980	1170		1170			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	7	8	17.272.700	8	19.324.100	Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah lembar penggandaan	Lembar	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	19500	30000		3000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Eksemplar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	4	4	6.720.000	4	5.400.000	Sekretariat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Rakor	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	24	40	209.997.750	40	182.438.394	Sekretariat	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	100	100	38.399.871	100	41.645.811		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Rekening	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	4	3	38.399.871	3	41.645.811	Sekretariat	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	100	100	125.422.900	100	128.678.606		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Unit	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya pada tahun bersangkutan	8	8	77.076.200	8	82.373.106	Sekretariat	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun bersangkutan	3	3		3			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Macam	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	4	4	3.579.100	4	3.579.100	Sekretariat	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	1	1	40.462.600	1	35.961.600	Sekretariat	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Macan	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	4	4	4.305.000	4	6.764.800	Sekretariat	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Tujuan 1 : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	Rasio	0,250	0,248		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	%	98,31	96,37		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang ditangani pada tahun n/Jumlah total rencana unit rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang akan ditangani pada tahun n x 100%	%	100	100	2.807.932.300	Bidang Perumahan	
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	Jumlah hunian Rusunawa yang terisi/jumlah hunian Rusunawa x 100%	%	100	95			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate/jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah x 100%	%	65	75	89.250.000	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun n	Dokumen	1	1	100.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi pada tahun n	Dokumen	NA	1	136.750.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus pada tahun n	Dokumen	2	0	152.500.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi : Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota x 100%	%	100	100	247.154.754	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun n	Orang	50	100	89.999.754	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih pada tahun n	Orang	20	40	44.645.800	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan pada tahun n	Dokumen	NA	2	112.509.200	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	Jml penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota dibagi Jml penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kotasesuai SPM dikali 100%	%	100	100	419.999.719	Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi pada tahun n	Unit Rumah	NA	10	179.999.719	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun pada tahun n	Unit Rumah	NA	6	240.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	Nilai IKM Pengelolaan Rusunawa	Indeks	B 80.17	B 80.57	1.681.527.827	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun pada tahun n	Laporan	NA	2	60.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus pada tahun n	Dokumen	NA	1	821.447.129	UPT Rusunawa	
1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun pada tahun n	Unit	NA	1	800.080.698	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Prosentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi / Jumlah Pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	%	NA	100	70.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tahun n	Laporan	NA	1	70.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	%	19.53	20,11	2.589.043.170	Bidang Perumahan	
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun n / Jumlah MBR yang belum memiliki rumah pada tahun dasar x 100%	%	0,93	1,03			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan / Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang direncanakan x 100%	%	NA	24,31	2.589.043.170	Bidang Perumahan	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki pada tahun n	Unit Rumah	58	105	2.589.043.170	Bidang Perumahan	
	Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	74.47		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik / jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	63,30	73.94		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n /panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman x 100%	%	62.65	67,52	12.290.441.150	Bidang Kawasan Permukiman	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n / panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman x 100%	%	56.88	66,27		Bidang Kawasan Permukiman	
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	%	9,8	12,65		Bidang Perumahan	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun pada tahun n	Dokumen	8	8	425.270.800	Bidang Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tahun n	Dokumen	4	4	345.273.100	Bidang Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh pada tahun n	Laporan	NA	2	33.175.500	Bidang Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh pada tahun n	Laporan	NA	2	46.822.200	Bidang Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	m	113.827	125.663	11. 865.170.350	Bidang Kawasan Permukiman	
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	m	54.027	67.664		Bidang Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya sampai tahun bersangkutan	Unit Rumah	140	332		Bidang Perumahan	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki pada tahun n	Unit Rumah	140	192	3.056.851.350	Bidang Perumahan	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh pada tahun n	Laporan	NA	4	114.902.700	Bidang Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar pada tahun n	Ha	NA	17	8.167.068.143	Bidang Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi pada tahun n	Dokumen	NA	1	126.348.157	Bidang Kawasan Permukiman	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni Yang dibangun	Jumlah Rumah Baru Layak Huni Yang dibangun pada tahun n	Unit Rumah	NA	10	400.000.000	Bidang Perumahan	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Panjang jalan lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n / panjang jalan lingkungan di perumahan x 100%	%	59	64	1.855.316.400	Bidang Perumahan	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Panjang drainase lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n / panjang drainase lingkungan di perumahan x 100%	%	59	64			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	m	19827.17	21123	1.855.316.400	Bidang Perumahan	
		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	m	13432.28	15475			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian pada tahun n	Lokasi	NA	4	1.755.316.400	Bidang Perumahan	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada tahun n	Laporan	12	4	100.000.000	Bidang Perumahan	
	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	Nilai	A 82,89	A 84,51		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	Nilai	A 82,89	A 84,51		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pada tahun bersangkutan	Indeks	B 80,17	B 80,57	4.912.556.852	Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	50.275.080	Sekretariat	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	15	15	12.637.540	Sekretariat	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	12	37.637.540	Sekretariat	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	3.509.911.660	Sekretariat	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/Bulan	30	26	3.503.046.660	Sekretariat	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	7	7	6.865.000	Sekretariat	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar / Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	100	91.401.453	Sekretariat	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	NA	2	68.750.000	Sekretariat	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan pada tahun berjalan	Orang	11	50	22.651.453	Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	100	335.804.792	Sekretariat	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	1	8.712.433	Sekretariat	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	3	20.904.833	Sekretariat	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	4	13.304.880	Sekretariat	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	1	53.000.000	Sekretariat	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	1	21.684.946	Sekretariat	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan – Perundang Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	NA	36	8.040.000	Sekretariat	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	40	200.157.700	Sekretariat	
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	NA	5	10.000.000	Sekretariat	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100 %	%	NA	85	20.551.249	Sekretariat	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	NA	0		Sekretariat	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	0		Sekretariat	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	RP		
1	2	3	5		6	7	8	11	12
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	NA	2	20.551.249	Sekretariat	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	100	100	668.249.871	Sekretariat	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	NA	24	38.399.871	Sekretariat	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	NA	247	629.850.000	Sekretariat	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100	236.362.747	Sekretariat	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	8	10	104.893.000	Sekretariat	
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	NA	3	15.000.000	Sekretariat	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	4	77	36.488.800	Sekretariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Tujuan 1 : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	Rasio	0,251		0,253		0,255		0,255		Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawas an Permu kiman	Kota Blitar
						Sasaran 1: Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	%	97.61		98.23		98.79		98.79		Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawas an Permu kiman	
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang ditangani pada tahun n/Jumlah total rencana unit rumah tangga korban bencana dan relokasi program pemerintah yang akan ditangani pada tahun n x 100%	%	100	2.562.946.300	100	2.641.293.725	100	2.723.358.875	100	10.735.531.200	Bidang Perum ahan	
							Persentase tingkat hunian Rusunawa	Jumlah hunian Rusunawa yang terisi/jumlah hunian Rusunawa x 100%	%	95		95		95		95		UPT Rusun awa	

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	02	2	01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate Dibagi Jumlah data data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah x 100%	%	80	275.832.500	85	316.279.375	90	264.093.600	90	945.455.475	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus pada tahun n	Dokumen	1	55.125.000	1	157.881.250	1	60.775.400	4	426.281.650	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi pada tahun n	Dokumen	1	118.587.500	0	0	0	0	2	255.337.500	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota pada tahun n	Dokumen	1	102.120.000	1	117.881.250	1	160.775.400	4	480.776.650	Bidang Perum ahan	

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	02	2	01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasipada tahun n	Dokumen	0	0	1	40.516.875	1	42.542.800	2		Bidang Perumahan	
1	04	02	2	02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi : Jml rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota x 100%	%	100	203.320.971	100	244.449.725	100	250.172.400	100	945.097.850	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun n	Orang	100	66.562.180	100	82.093.125	100	84.697.900	400	323.352.959	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih pada tahun n	Orang	40	46.878.000	40	49.221.900	40	51.683.000	160	192.428.700	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan pada tahun n	Dokumen	2	89.880.791	2	113.134.700	2	113.791.500	8	429.316.191	Bidang Perumahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	02	2	03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/ relokasi program kabupaten/ kota	Jml penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/ relokasi program kabupaten/ kota dibagi Jml penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/ relokasi program kabupaten/ kota sesuai SPM dikali 100%	%	100	437.345.700	100	459.213.075	100	482.173.800	100	1.798.732.294	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi pada tahun n	Unit Rumah	10	181.658.200	10	190.741.200	10	200.278.300	40	752.677.419	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	03	0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun pada tahun n	Unit Rumah	4	191765600	4	201353975	4	211421600	18	844.541.175	Bidang Perumahan	
1	04	02	2	03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota pada tahun n	Unit Rumah	2	63921900	2	67117900	2	70473900	6	201.513.700	Bidang Perumahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	02	2	05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	Nilai IKM Pengelolaan Rusunawa	Indeks	B 84,25	1.576.447.129	B 84,35	1.551.351.550	B 84,45	1.651.919.075	B 84,45	6.461.245.581	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun pada tahun n	Laporan	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	8	270.000.000	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus pada tahun n	Dokumen	1	761.447.129	1	837.591.842	1	921.350.996	4	3.341.837.096	UPT Rusun awa	
1	04	02	2	05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun pada tahun n	Unit	1	750.000.000	1	643.759.708	1	655.568.079	4	2.849.408.485	Bidang Perum ahan	
1	04	02	2	06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Prosentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi / Jumlah Pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	%	100	70.000.000	100	80.000.000	100	75.000.000	100	295.000.000	Bidang Perum ahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	02	2	06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tahun n	Laporan	1	70.000.000	1	80.000.000	1	75.000.000	4	295.000.000	Bidang Perumahan	
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	%	20,11	2.718.495.400	20,11	2.854.420.170	22,4	3.249.141.200	82,73	11.411.099.940	Bidang Perumahan	
							Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun n / Jumlah MBR yang belum memiliki rumah pada tahun dasar x 100%	%	1,03		1,03		1,03		4,12			
1	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan / Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang direncanakan x 100%	%	48,61	2.718.495.400	72,92	2.854.420.170	100	3.249.141.200	100	11.411.099.940	Bidang Perumahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	04	2	01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki pada tahun n	Unit Rumah	105	2.718.495.400	105	2.854.420.170	117	3.249.141.200	432	11.411.099.940	Bidang Perumahan	
						Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/ Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	78.19 %		81.91 %		85.64 %		85.64 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/ Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	79.26 %		84.57 %		89.89 %		89.89 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n /panjang jalan lingkungan di kawasan permukiman x 100%	%	69,15	12.904.963.500	70,77	13.550.211.714	72	14.227.722.435	72	52.973.338.799	Bidang Kawasan Permukiman	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggug Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n /panjang drainase lingkungan di kawasan permukiman x 100%	%	69,4		72,53		75,66		75,66		Bidang Kawas an Permu kiman	
							Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni atau rusak yang tertangani di kawasan permukiman kumuh pada tahun n / Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh pada tahun dasar x 100%	%	13,09		13,53		13,96		52,23		Bidang Perum ahan	
1	04	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun pada tahun n	Dokumen	8	446.534.475	8	468.861.314	8	492.304.500	32	1.833.971.089	Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	03	2	02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh pada tahun n	Laporan	2	48.504.675	2	50.855.314	2	52.421.000	8	198.603.189	Bidang Kawas an Permu kiman	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	03	2	02	0008	Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Te rlegalisasi pada tahun n	Dokumen	4	362.536.800	4	380.663.700	4	399.696.900	12	1.142.897.400	Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	03	2	02	0012	Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina pada tahun n	Kelompok Masyarakat	2	35.493.000	2	37.342.300	2	40.186.600	6	113.021.900	Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	m	130.663	12.458.429.025	135.663	13.081.350.400	140.663	13.735.417.935	140.663	51.140.367.710	Bidang Kawas an Permu kiman	
							Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik pada tahun n	m	73.663		79.663		85.663		85.663		Bidang Kawas an Permu kiman	
							Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya sampai tahun bersangkutan	Unit Rumah	524		717		910		910		Bidang Perum ahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	03	2	03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki pada tahun n	Unit Rumah	192	3.209.694.000	193	3.370.178.700	193	3.538.687.635	770	13.175.411.685	Bidang Perum ahan	
1	04	03	2	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremaj aan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh pada tahun n	Laporan	4	126.393.000	4	139.032.300	4	152.935.500	16	533.263.500	Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	03	2	03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi pada tahun n	Dokumen	1	138.982.973	1	152.881.270	1	168.169.397	4	152.881.270	Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	03	2	03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan pada tahun n	Ha	17	8.533.359.052	17	8.919.258.130	17	9.325.625.403	68	34.945.310.728	Bidang Kawas an Permu kiman	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Panjang jalan lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n /panjang jalan lingkungan di perumahan x 100%	%	66	1.948.082.300	68	2.054.486.465	70	2.157.210.798	70	8.015.095.963	Bidang Perum ahan	
							Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Panjang drainase lingkungan di perumahan dalam kondisi baik pada tahun n /panjang drainase lingkungan di perumahan x 100%	%	66		68		70		70		Bidang Kawas an Permu kiman	
1	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	m	22123	1.948.082.300	23123	2.054.486.465	24123	2.157.210.798	24123	8.015.095.963	Bidang Perum ahan	
							Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik pada tahun n	m	17475		19475		21475		21475			
1	04	05	2	01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian pada tahun n	Lokasi	4	1.828.680.000	4	1.929.114.000	4	2.025.569.700	16	7.538.680.100	Bidang Perum ahan	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	05	2	01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada tahun n	Laporan	4	119.402.300	4	125.372.465	4	131.641.098	16	476.415.863	Bidang Perumahan	
						Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	Nilai	A 84,53		A 84,55		A 84,57		A 84,57		DPRKP	
						Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	Nilai	A 84,53		A 84,55		A 84,57		A 84,57		DPRKP	
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM pada tahun bersangkutan	B Indeks	B 84,25	5.158.160.074	B 84,35	5.415.568.698	B 84,45	5.685.847.796	B 84,45	21.172.133.420	Sekretariat	
1	04	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	23.500.000	100	29.200.000	100	30.000.000	100	132.975.080	Sekretariat	
1	04	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	15	7.000.000	15	12.200.000	15	12.500.000	60	44.337.540	Sekretariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	16.500.000	12	17.000.000	12	17.500.000	48	88.637.540	Sekret ariat	
1	04	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	3.615.749.160	100	3.796.536.670	100	3.986.363.520	100	14.908.561.010	Sekret ariat	
1	04	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/ Bulan	26	3.608.138.060	26	3.788.544.970	26	3.977.972.220	26	14.877.701.910	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD pada tahun berjalan	Laporan	7	7.611.100	7	7.991.700	7	8.391.300	28	30.859.100	Sekret ariat	
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	102.806.750	100	115.805.600	100	130.647.970	100	440.661.773	Sekret ariat	
1	04	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	2	75.625.000	2	83.187.500	2	91.506.250	8	319.068.750	Sekret ariat	
1	04	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	Orang	50	27.181.750	50	32.618.100	50	39.141.720	200	121.593.023	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	354.392.685	100	355.203.600	100	367.793.919	100	1.413.194.996	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	10.703.900	1	11.239.100	1	11.801.100	4	42.456.533	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	24.436.200	3	25.973.100	3	27.271.660	12	98.585.793	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	15.965.800	4	16.346.100	4	17.163.500	16	62.780.280	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	30	53.000.000	30	55.650.000	30	58.432.500	120	220.082.500	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	19.995.500	1	20.995.3000	1	21.625.159	4	84.300.905	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	8.040.000	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	200.165.585	40	210.000.000	40	220.000.000	160	830.323.285	Sekret ariat	
1	04	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	5	30.125.700	5	15.000.000	5	11.500.000	20	66.625.700	Sekret ariat	
1	04	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Dibagi Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%	%	87	30.085.000	88	50.000.000	89	75.000.000	89	175.636.249	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	Sekret ariat	
1	04	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekret ariat	
1	04	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	30.085.000	3	50.000.000	3	55.000.000	11	155.636.249	Sekret ariat	
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	100	797.329.200	100	820.656.076	100	846.336.758	100	3.132.571.905	Sekret ariat	
1	04	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	53.100.000	36	54.100.000	36	56.784.000	132	202.383.871	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	286	744.229.200	286	766.556.076	286	789.552.758	1105	2.930.188.034	Sekret ariat	
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	234.297.279	100	248.166.752	100	249.705.629	100	968.532.407	Sekret ariat	
1	04	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	10	141.773.400	10	148.862.100	10	156.305.173	10	551.833.673	Sekret ariat	
1	04	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	0	0	0	0	.1	15.000.000	2	30.000.000	Sekret ariat	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penan ggung Jawab	Loka si
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	30	40.137.680	20	27.480.252	17	23.984.756	144	128.091.488	Sekret ariat	
1	04	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si pada tahun berjalan	Unit	1	38.661.700	1	46.840.700	1	49.182.800	1	177.171.000	Sekret ariat	
1	04	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	13.724.499	1	24.983.700	1	5.232.900	4	81.436.246	Sekret ariat	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada akhir periode RENSTRA.

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD / Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	96,37 %	96,99 %	97,61 %	98,23 %	98,79 %	98,79 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	68,62 %	73,94 %	79,26 %	84,57 %	89,89 %	89,89 %
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84.51	A 84.51	A 84.53	A 84.55	A 84.57	A 84.57

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar
Tahun 2022-2026

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	%	96,37	96,99	97,61	98,23	98,79
2.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	%	68,62	73,94	79,26	84,57	89,89
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	Nilai	A 84,51	A 84,51	A 84,53	A 84,55	A 84,57

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan
Permukiman

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	12,09	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	84,6
	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	Jumlah	236	236	236	236	236	236	1180
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah	40.463	40.761	41.059	41.357	41.655	41.953	41.953

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan, penambahan sub kegiatan dan perubahan indikator sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;

dan juga disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Blitar guna mewujudkan visi dan misi daerah. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rumusan program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja periode Renstra sebelumnya, identifikasi strategis dan permasalahan bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Dari hasil identifikasi dan analisa tersebut dapat diketahui peluang dan tantangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mengelola dan meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan Kota Blitar yang layak huni.

Untuk menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan, Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan dari pemerintah. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.